

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI PADA KOTA BITUNG)

ANALYSIS INFLUENCE OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS TOWARDS THE CAPITAL EXPENDITURE (STUDI IN BITUNG CITY)

Andri Tolu, Een N. Walewangko, Steeva Y.L. Tumangkeng

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan

Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : andrie320@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Indonesia telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, oleh karena itu pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada alokasi Belanja Modal pada Kota Bitung. Hasil yang didapat dari penelitian ini, dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Dependen Belanja Modal. Namun secara parsial Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal .

ABSTRACT

Policy on regional autonomy within Indonesia has had repercussions on the region to be able to carry out development in all fields, in the hope can be implemented independently by region. In today's era of fiscal decentralization is expected an increase in service in various sectors, especially the public sector, therefore, shift the composition of spending is a logical attempt by the local governments in order to increase public confidence. The objective of this research was to determine whether Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Funds affect the allocation of capital expenditures in Bitung. The results of this study, using Ordinary Least Square (OLS), shows that the Local Own-Source Revenue, General Allocation Funds and Special Allocation Fund simultaneously have a positive influence on the Dependent Variable Capital Expenditure. However the partial Independent Variables Local Revenue and Special Allocation Fund does not have a significant impact on capital expenditures.

Keywords : Local Own-Source Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditure

1. PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk dibidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan [6]. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Negara sendiri memiliki alokasi belanja yang tentunya melalui APBN. Belanja Negara terdiri atas dua jenis : 1). **Belanja pemerintah pusat**, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembanguana pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi Non-BBM, belanja gibah, belanja social (termasuk penanggulangan bencana), dan belanja lainnya. 2). **Belanja daerah**, adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah[8]. Sedangkan menurut Warsito Kawedar, dkk[5], Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang pemerintah daerah [9], maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber- sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik [6]. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain

penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola anggaran rumah tangganya, meski pemerintah dituntut untuk lebih mandiri dalam pengelolaan sumber-sumber ekonominya yang nantinya akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pemerintah pusat juga terus mendukung pemerintah daerah melalui dana transfer ke pemerintah daerah yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri [7].

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar.

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya, sedangkan daerah-daerah tersebut belum tentu membutuhkan sesuai dengan permintaannya dan akhirnya tidak efektif dalam penganggaran. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah mengeluarkan satu instrumen dana transfer kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penganggarnya juga bersumber dari APBN, dengan tujuan untuk membiayai urusan di daerah namun merupakan prioritas nasional.

Berdasarkan Undang-Undang tentang dana perimbangan [10], disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk [5] mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian

kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim [4] belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Menurut Standar Akutansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja atau pengeluaran pada periode anggaran daerah yang termasuk dalam Belanja Langsung. Belanja sendiri tidak lepas dari besarnya pendapatan yang di dapat oleh pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan uraian di atas muncul pertanyaan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal pada pemerintah Kota Bitung. Dalam hal ini faktor-faktor yang di analisis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dana transfer Pemerintah Pusat dalam hal ini faktor yang di analisis adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtun waktu selama sepuluh tahun yaitu dari tahun 2004-2013. Data diperoleh secara langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2005-2014 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)[2] dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung[1].
- b. Data Dana Alokasi Umum (DAU) selama tahun 2005-2014 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)[2] dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung.[1]
- c. Data Dana Alokasi Khusus (DAK) selama tahun 2005-2014 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)[2] dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung[1].
- d. Data Belanja Modal selama tahun 2005-2014 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)[2] dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bitung.[1]

Metode Analisis

Metode ekonometrika yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square*). Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen[3]. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *IBM SPSS STATISTICS 21* dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Fungsi persamaan umum yang akan diamati dalam penelitian ini adalah :

Belanja Modal = f (PAD, DAU dan DAK).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Secara pengertian ekonomi, penjelasan fungsi matematis tersebut adalah perubahan Belanja Modal akan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Uji regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

dimana :

Y	=	Belanja Modal
PAD (X1)	=	Investasi swasta
DAU (X2)	=	Belanja modal
DAK (X3)	=	Tenaga kerja
e_i	=	Observasi ke i
μ	=	Kesalahan yang disebabkan oleh factor acak.
	=	Konstanta

Uji t-parsial (*partial test*)

Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Dalam uji t digunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_A : \beta_i \neq 0$$

Dimana β_i adalah koefisien variabel independen ke-i adalah nilai parameter hipotesis biasanya nilai β_i dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X_i terhadap Y. Bila nilai thitung > tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata terhadap variabel independen.

Nilai thitung diperoleh dengan rumus :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_i}{\text{Se}(\beta_i)}$$

$$t_{\text{tabel}} = n - k - 1$$

Dimana :

β_i	=	koefisien regresi variabel independen ke-i
Se	=	standar error dari variabel independen ke-i
N	=	jumlah data
K	=	jumlah variabel

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima
2. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak

Dimana dalam melihat determinasi signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan < 0,05 maka berdeterminasi signifikan
2. Jika Signifikan > 0,05 maka tidak ada determinasi signifikan

Uji-F (Over all test)

Uji F-statistik ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama/serentak terhadap variabel dependen. Untuk pengujian F-statistik digunakan hipotesa sebagai berikut :

H0 : b1 = b2 = 0 (tidak ada pengaruh)

HA : b1 ≠ 0 (ada pengaruh) untuk i = 1 k

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Dimana :

R2 = Koefisien determinasi

K = Banyaknya variabel total yang diperkirakan, satu diantaranya unsur intercept

n = Jumlah sampel

kriteria :

H0 diterima jika F-hitung < F-tabel

HA diterima jika F-hitung > F-tabel

Nilai Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel X1, dan X2 terhadap variasi (naik turunnya) Y digunakan koefisien determinasi. Nilai R2 digunakan antara 0 sampai 1 (0 < R2 < 1) semakin mendekati 1 berarti semakin tepat garis regresi untuk meramalkan nilai variabel terkait Y.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen di antara satu dengan lainnya. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas data

Tabel.1 Uji Normalitas Data

		BELANJA MODAL	PAD	DAU	DAK
N		10	10	10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	10.8909	11.2876	11.4507	10.4734
	Std. Deviation	.37587	.25045	.15802	.22270
Most Extreme Differences	Absolute	.306	.154	.156	.191
	Positive	.175	.154	.132	.131
	Negative	-.306	-.132	-.156	-.191
Kolmogorov-Smirnov Z		.967	.488	.494	.603
Asymp. Sig. (2-tailed)		.307	.971	.968	.860

Sumber data : Pengolahan Data 2015

Berdasarkan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Sminov diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) masing-masing variabel X1 0,971, X2 0,968, X3 0,860 dan Y1 0,307. Yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

Uji t-parsial (*partial test*)

Tabel.2 Uji t Tabel Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-14.588	3.811		-3.828	.009
PAD	-.431	.354	-.287	-1.217	.269
DAU	2.155	.870	.906	2.478	.048
DAK	.541	.397	.321	1.365	.221

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Dari tabel di atas dapat dijelaskan persamaan regresi sebagai :

$$Y = -0,431 + 2,155X_1 + 0,541X_2 + e$$

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Determinasi linier antara Variabel Independen Exogenus PAD terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal ialah (-1,217). Besarnya determinasi Variabel Independen Exogenus PAD terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah -0,287 tidak Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig 0,269 > 0,05.

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Determinasi linier antara Variabel Independen Exogenus DAU terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal ialah (2,478). Besarnya determinasi Variabel Independen Exogenus DAU terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,906 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig 0,048 < 0,05.

Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Determinasi linier antara Variabel Independen Exogenus DAK terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal ialah 1,365. Besarnya determinasi Variabel Independen Exogenus DAK terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,321 tidak Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig 0,221 > 0,05.

Uji-F (*Over all test*)

Untuk mengetahui model regresi yang telah dibuat sudah benar adalah dengan menggunakan pengujian dengan dua cara, yaitu Pertama menggunakan nilai F pada tabel keluaran ANOVA, dan Kedua dengan cara menggunakan nilai Probabilitas / nilai Sig pada tabel 3.3 keluaran ANOVA.

Tabel. 3 ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.192	3	.397	30.077	.001 ^b
Residual	.079	6	.013		
Total	1.271	9			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Menghitung nilai F tabel dengan Ketentuan besar nilai taraf Signifikansi sebesar 0,05 dan Nilai Degree Of Freedom dengan ketentuan Numerator / Vektor 1 : Jumlah Variabel – 1 atau 4 – 1 = 3, dan dumerator / Vektor 2 : jumlah kasus-jumlah variabel atau 10 – 4 = 6. Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 3,288.

Dengan kriteria pengambilan keputusan hasil pengujian hipotesis
 Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima.
 Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Hasil uji hipotesis adalah :

Hasil perhitungan dengan SPSS didapatkan angka F hitung sebesar 30,077 > F tabel sebesar 3,288. Dengan demikian H0 ditolak, dan H1 diterima. Artinya ada hubungan linier antara Variabel Independen Eksogenus PAD, DAU, dan DAK dengan Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal. Dengan nilai Sig 0,001 Kesimpulan adalah model regresi di atas sudah layak dan benar.

Nilai Koefisien Determinasi (R²)

Tabel.4

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	.968 ^a	.938	.906	.11495	.938	30.077

Sumber Data : Pengolahan Data 2015

Dalam melihat determinasi Variabel Independen Exogenous PAD, DAU, DAK secara gabungan terhadap variabel Dependen Endogenus Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 43.4 Model Summary diatas, pada nilai R square. Besarnya R square (R²) pada tabel dibawah ini adalah 0,938. Angka tersebut mempunyai makna Besarnya determinasi Variabel independen exogenous PAD, DAU, DAN DAK terhadap variabel dependen endogenus Belanja Modal secara gabungan. Dalam menghitung Koefisien Determinasi (KD) dapat diketahui dengan rumus :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,938 \times 100\%$$

$$KD = 93,8\%$$

Besarnya determinasi Variabel Independen Exogenous PAD, DAU, DAN DAK terhadap Variabel Dependen Endogenus Belanja Modal secara gabungan adalah 93,8%.

Dan determinasi diluar model dapat di hitung dengan :

$$e = 1 - R^2$$

$$e = 1 - 0,938$$

$$e = 0,062 \times 100\%$$

$$e = 6,2\%$$

Yang berarti 6,2% berarti besarnya faktor lain yang memdeterminasii diluar model yang di teliti. Artinya besarnya determinasi variabel independen ekxogenous PAD, DAU, dan DAK variabel dependen endogenus Belanja Modal adalah sebesar 93,8%, sedangkan determinasi sebesar 6,2% disebabkan oleh variabel di luar model yang di teliti.

Uji Multikolinearitas

Tabel. 5 Tabel Multikorelasi

Model	Correlations	Collinearity Statistics	
	Part	Tolerance	VIF
(Constant)			
PAD	-.124	.187	5.360
DAU	.253	.078	12.862
DAK	.139	.188	5.313

Sumber data : Pengolahan Data 2015

Dilihat dari tabel 3.5 Coefficients nilai VIF pada Output menunjukkan keberadaan *multikolinearitas*.

Bila $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi gejala Multikolerasi

Bila $VIF > 10,00$ maka terjadi gejala Multikolerasi

Dengan Hasil :

Nilai Tolerance : X1 PAD= 0,187

: X2 DAU = 0,078

: X3 DAK = 0,188

Nilai VIF : X1 PAD = 5,360

: X2 DAU = 12,862

: X3 DAK = 5,313

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan, pengaruh antara PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja Modal memiliki pengaruh yang baik. Berdasarkan hasil data-data yang dikumpulkan bahwa hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Kota Bitung.
2. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Kota Bitung.
3. Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi Belanja Modal Kota Bitung.

Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal pada Kota Bitung.

Saran

1. Mengalokasikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan (DAU dan DAK), untuk anggaran Belanja Modal yang diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat..
2. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dikurangi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah model penelitian dengan menambahkan variabel seperti halnya variabel non keuangan. Variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah daerah dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar tingkat

pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik Kota Bitung www.bitungkota.bps.go.id *Bitung dalam angka*
- [2] Badan Pusat Statistik Kota Bitung www.bitungkota.bps.go.id *Bitung dalam angka*
- [3] Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonomitrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta.
- [4] Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*.
- [5] Kawendar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro
- [6] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- [7] Maimunah, Mutiara. (2006). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [9] Undang-undang No.33 Tahun 2004
- [10] Undang-Undang No 104 Tahun 2000 Pasal 19 tentang dana perimbangan.